

FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR

Oleh:

Linawati

Universitas Nusantara PGRI Kediri

linawati@unpkediri.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Diwujudkan dengan melakukan perencanaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena flypaper effect pada pengelolaan keuangan daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Pengelolaan diproksikan dengan mengkaji pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah. Analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian mendapatkan bukti bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota dan Kabupaten Di Jawa Timur. Hasil penelitian juga menemukan hasil bahwa tidak terjadi fenomena flypaper Effect pada kota dan kabupaten di Jawa Timur. Hal ini mengungkapkan bahwa pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Jawa timur tidak mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat berupa DAU sebagai sumber pembiayaan untuk belanja daerahnya. Pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur ingin mewujudkan otonomi daerah yang kuat, dengan tingkat kemandirian daerah yang tinggi.

Kata kunci: Flypaper Effect, PAD, DAU, Belanja Daerah

ABSTRACT

Local governments must do financial management well. Realized by planning effective and efficient regional revenue and expenditure. This study aims to analyze the flypaper effect phenomenon in the financial management of the City and Regency area in East Java. Management is proxied by examining the effect of PAD and DAU on regional expenditure. The analysis uses multiple regression analysis. The results of the study obtained evidence that Regional Original Income and General Allocation Funds partially or simultaneously had a significant effect on regional expenditure in City and Regency in East Java. The results also found that there was no flypaper effect phenomenon in cities and districts in East Java. This reveals that the City and Regency regional governments in East Java do not rely on transfer funds from the central government in the form of DAU as a source of funding for their regional expenditure. City and Regency regional governments in East Java want to realize strong regional autonomy, with a high level of regional independence

Keywords: flypaper, PAD, DAU, Regional Expenditures.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang - Undang (UU) nomor 32 Tahun 2004. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan kekuasaan, kewenangan, dan keleluasaan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya dalam menjalankan pemerintahannya. Implementasi pelaksanaan

otonomi daerah juga tertera dalam UU nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, transparan, dan bertanggungjawab sebagai wujud desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah diberikan dana

perimbangan dari pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mengelola daerahnya. Dana perimbangan terwujud dalam Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pengelolaan keuangan daerah terwujud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari sumber – sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Pemerintah daerah akan menggunakan dana perimbangan bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah dan akan mengalokasikan pada pengeluaran berupa belanja daerah. Diperlukan perencanaan yang baik dan bijak oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah tetap terjaga dan terkendali.

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Wahyuni dan Supheni, 2017). PAD setiap daerah berbeda- beda, hal ini tergantung dari kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Kondisi dan potensi daerah dapat dilihat dari kemajuan industri dan kekayaan alam yang dimiliki daerah. Daerah dengan kekayaan alam yang melimpah dan kemajuan industri, cenderung memiliki PAD yang jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah dengan kemajuan industri yang rendah dan kekayaan alam yang minim. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah terkait penerimaan PAD adalah bagaimana kemampuan daerah dalam menggali sumber- sumber PAD. Misalnya kurang maksimalnya penggalian sumber penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan BUMD yang kurang maksimal. Pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerahnya khususnya dari sumber asli daerah yaitu PAD. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan keuangannya. Tanpa adanya hal tersebut akan mengakibatkan ketimpangan pada keuangan

daerah, baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran daerah.

Sumber pendapatan lain pemerintah daerah selain PAD adalah DAU. Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004, DAU merupakan dana transfer ke daerah yang berasal dari APBN, yang dialokasikan ke daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi. Peran DAU yaitu pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan keuangan antar daerah berdasarkan pertimbangan potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam DAU terletak pada sudut pandang dalam memahami peranan DAU itu sendiri oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan DAU sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemerintah daerah agar terjadi pemerataan keuangan antar daerah. Mewujudkan tidak ada *gap* atau kesenjangan yang terlalu jauh antara daerah satu dengan daerah yang lain. Adapun pemerintah daerah memandang pemberian DAU dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan daerah. Menurut Halim (2017), DAU adalah transfer dana yang bersifat "*block grant*", sehingga pemerintah daerah leluasa untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah merespon dengan melakukan pembelanjaan yang tinggi dari DAU dibandingkan dari PAD itu sendiri.

Sisi pengeluaran pada APBD adalah pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme belanja daerah. Belanja daerah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang bersumber dari pendapatan daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas masyarakat dan memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu belanja daerah

mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Belanja daerah dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, misalnya belanja modal, belanja barang dan jasa. Adapun belanja tidak langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Contoh belanja tidak langsung adalah belanja bunga, belanja hibah, bantuan sosial dan lainnya. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan penerimaan pemerintah daerah.

Flypaper effect atau efek kertas layang merupakan kondisi yang terjadi saat pemerintah merespon pelaksanaan belanja daerahnya lebih banyak menggunakan dana transfer yang diprosikan dengan DAU, dibandingkan dengan PAD yang merupakan kemampuan pemerintah daerah sendiri. *Flypaper effect* dapat dikatakan sebagai perilaku yang normal dan rasional bahwa dana transfer merupakan dana tambahan untuk masyarakat. Dengan demikian perlakuannyapun sama dengan pajak sehingga dapat dilakukan pembelanjaan. Sehingga pemerintah daerah beranggapan bahwa wajar jika mereka menaikkan belanja dengan adanya dana transfer, tanpa berupaya untuk menaikkan penerimaan pendapatan yang berasal dari potensi daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya yang masuk dalam PAD.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai PAD dan DAU terhadap belanja daerah serta fenomena *flypaper effect* masih mendapatkan hasil yang berbeda. Penelitian Ihsan dan Supriyati (2016), Pramuka (2010) yang menunjukkan hasil bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja daerah baik secara parsial dan simultan. Berbeda dengan penelitian Wahyuni dan Supheni (2017) yang memperoleh hasil bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja daerah.

Penelitian Urip dan Indahyani (2017) yang melakukan penelitian pada pengelolaan keuangan di Kota Jayapura mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat fenomena *Flypaper Effect* dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Jayapura. Demikian pula hasil penelitian Pramuka (2010) menemukan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah di pemerintah daerah di Jawa. Berbeda dengan penelitian Wahyuni dan Supheni (2017), yang melakukan penelitian di Kabupaten Nganjuk, yang menemukan hasil ada *flypaper effect* pada belanja daerahnya. Pemerintah daerah masih bergantung pada DAU untuk membiayai semua pengeluarannya.

Masih adanya perbedaan hasil dari penelitian – penelitian terdahulu, dan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda – beda, maka fenomena *flypaper effect* menjadikan obyek kajian yang representatif untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengelolaan keuangan daerah, yang diprosikan dengan pengaruh PAD dan DAU secara parsial maupun simultan terhadap belanja daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Serta apakah terjadi fenomena *Flypaper effect* pada PAD dan DAU terhadap belanja daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode data yang diteliti yaitu realisasi PAD, DAU dan belanja daerah tahun 2013 sampai 2017. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang relevan pada kondisi saat ini.

Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2004). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber asli daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya dapat diukur dari tingkat kontribusi PAD terhadap APBD.

Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian daerah semakin tinggi, atau semakin kecil ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang handal, diperlukan upaya – upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri dengan meningkatkan penerimaan PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada dan atau menggali potensi sumber PAD yang baru sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Misalnya mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi, dengan cara sosialisasi terkait peraturan perpajakan. Pada sumber penerimaan PAD dari pengelolaan BUMD, pemerintah dapat melakukan pengelolaan BUMD secara maksimal.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan. Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005, DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Ihsan dan Supriyati (2016) mengatakan bahwa DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah, yang diperuntukkan pendanaan kelengkapan fasilitas sosial dan fasilitas umum daerah. DAU diberikan dengan prioritas pada daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah dimana daerah belum mampu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Pada daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi maka pemberian DAU akan lebih kecil. Hal ini dimaksudkan dapat mengurangi ketidakseimbangan fiskal antar daerah. Hal ini sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan menggunakan pendekatan

fiscal gap, dimana kebutuhan DAU ditentukan atas kebutuhan dan potensi daerah.

Belanja Daerah

Berdasarkan UU nomor 33 Tahun 2004, Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pembelanjaan daerah (Ihsan dan Suprayati, 2016). Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai pelayanan dasar pada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, misalnya belanja modal, belanja barang dan jasa. Adapun belanja tidak langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Contoh belanja tidak langsung adalah belanja bunga, belanja hibah, bantuan sosial dan lainnya.

Flypaper Effect

Pemerintah melakukan transfer ke daerah yang dipergunakan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah dalam bentuk belanja daerah. Alokasi yang diperoleh daerah dari pusat dapat dijadikan spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon adanya perubahan transfer secara asimetris. Hal ini mendorong perilaku pemerintah daerah akan cenderung mendorong kearah penggunaan anggaran yang tidak efisien.

Gejala *flypaper effect* didasarkan pada teori *fiscal illusion* (ilusi fiskal) dan *bureaucratic model* (model birokratik). Teori *fiscal illusion* menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat mengenai pembiayaan dan pembelanjaan, serta pengambilan keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi. Pada *bureaucratic model* merupakan hasil

perilaku manusia dalam memaksimalkan anggaran oleh birokrat yang lebih mudah untuk menghabiskan dana transfer daripada menaikkan pajak. Sehingga kekuasaan dan pengetahuan birokrat pada anggaran dan transfer menjadikan terjadinya *flypaper effect*.

Menurut Maimunah (2006), *Fypaper effect* atau efek kertas layang merupakan kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja yang lebih banyak menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuannya sendiri yang diprosikan dengan PAD. Fenomena *flypaper effect* berimplikasi bahwa transfer pemerintah pusat akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar dari pada transfer yang diterima. Pemerintah daerah akan cenderung boros pada pengeluarannya, dan melakukan belanja mengandalkan transfer daripada pendapatannya sendiri.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

PAD merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah salah satunya adalah PAD dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah yaitu belanja daerah. Dengan PAD yang semakin besar, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintahannya. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja daerah yang lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi PAD yang tinggi pada struktur pendapatan daerah mengindikasikan bahwa kemandirian daerah semakin baik, ketergantungan pada transfer pemerintah pusat semakin kecil. Kinerja keuangan pemerintah daerah tentunya semakin baik, karena kecukupan belanjanya sebagian besar dari PAD. Penelitian terdahulu, seperti penelitian Ihsan dan Supriyati (2016), Pramuka (2010) memperoleh hasil bahwa PAD mempunyai pengaruh terhadap Belanja daerah.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2013-2017

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Sumber penerimaan daerah dalam konteks ekonomi dan desentralisasi saat ini masih sangat didominasi oleh transfer pemerintah pusat yang terwujud dalam dana perimbangan. Salah satu dana perimbangan yang didapatkan adalah DAU. DAU merupakan sarana pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan maksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah yang disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU yang diterima oleh daerah dapat dijadikan tolok ukur kemandirian daerah. Semakin banyak DAU yang diterima menandakan bahwa tingkat kemandirian daerah semakin kecil dan sebaliknya. Penelitian Wahyuni dan Supheni (2017), Ihsan dan Supriyati (2016), Pramuka (2010) memperoleh hasil bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja daerah. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2013-2017

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik, secara terencana dan terkendali. Penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah harus dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan beragamnya sumber penerimaan pendapatan daerah, misalnya PAD dan DAU maka mendorong bertambah pula belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan pola anggaran yang berimbang maka ketika penerimaan bertambah maka pengeluaran

juga bertambah. Pemerintah daerah harus mengatur sumber-sumber penerimaannya dan mengalokasikan untuk pengeluarannya secara adil, sesuai dengan porsi dari sumber penerimaan. Dengan bertambahnya PAD dan DAU maka belanja daerah juga akan bertambah. Penelitian Ihsan dan Supriyati (2016), Pramuka (2010) yang menunjukkan hasil bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2013-2017.

Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah

Fenomena *flypaper effect* terjadi saat pemerintah daerah memberikan respon dengan melakukan belanja daerah semakin banyak atau terlalu boros dengan menggunakan DAU daripada PAD. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk menghabiskan dana perimbangan yang diperolehnya untuk mencukupi kegiatan – kegiatan di daerahnya. Hal ini dapat didasarkan oleh anggapan pemerintah daerah bahwa pemerintah pusat tidak memberikan syarat tertentu dalam penggunaan DAU, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk melakukan belanja daerah yang bersumber dari DAU. Dengan semakin besarnya belanja daerah yang bersal dari DAU dibandingkan dari PAD, maka mendorong terjadinya *flypaper effect*. Hasil penelitian Armawaddin dkk (2017), menemukan terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah dari DAK di Kabupaten dan Kota di Sulawesi. Wahyuni dan Supheni (2017) menemukan adanya *flypaper effect* pada belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis keempat dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₄ : Terjadi *Flypaper Effect* pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2013-2017

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur, dengan obyek penelitian adalah laporan realisasi APBD. Data yang dipergunakan dalam penelitian merupakan data sekunder realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2013-2017. Data didapatkan dari Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada situs www.djpk.kemenkeu.go.id Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, dimana semua anggota populasi menjadi sampel penelitian, terdapat 38 Kota dan Kabupaten di Jawa Timur, hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran yang nyata pada populasi.

Terdapat 2 variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu PAD dan DAU, dengan variabel terikatnya adalah Belanja Daerah. Variabel PAD diukur dengan nilai realisasi total PAD. PAD terdiri atas Penerimaan pajak daerah, Retribusi daerah, Laba BUMD dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Variabel DAU diukur dengan nilai realisasi DAU, dan variabel belanja daerah diukur dengan nilai realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung daerah. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan *Software SPSS 23*, dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Persamaan regresi penelitian sebagai berikut: $BD = a + b_1PAD + b_2 DAU + e$

Pengujian hipotesis 1 sampai 3 dilakukan dengan menguji secara parsial dan simultan pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Kriteria pengujian hipotesis, didasarkan pada H_a diterima dan H₀ ditolak apabila nilai sig < 0,05. Pengujian hipotesis ke-4, yaitu untuk mendeteksi adanya fenomena *flypaper effect* pada pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan membandingkan efek DAU terhadap Belanja Daerah dengan Efek PAD terhadap Belanja Daerah. Apabila nilai koefisien DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dari koefisien PAD terhadap Belanja Daerah dan keduanya signifikan atau PAD

tidak signifikan, maka dapat ditarik kesimpulan adanya *flypaper effect* pada pengelolaan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebelum melakukan analisis regresi untuk menguji hipotesis penelitian, terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Berdasarkan data yang diperoleh, berikut ini disajikan hasil pengujian asumsi klasik pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil uji normalitas data

| | | Unstandardized Residual |
|--------------------------|-----------|-------------------------|
| N | | 132 |
| Normal Parameters | Mean | -,0000675 |
| | Std. | 260022776126,327 |
| | | 7 |
| a,b | Deviation | 6000 |
| | n | ,075 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,075 |
| | e | -,074 |
| | Positive | ,075 |
| | Negative | ,065 ^c |
| Test Statistic | | |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | |

Sumber: data diolah, 2019

Hasil uji One Sample kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dikarenakan nilai Sig 0.065 > 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

| Model | Collinearity Statistics | |
|--------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | | |
| PAD | ,697 | 1,434 |
| DAU | ,697 | 1,434 |

Sumber: data diolah, 2019

Pada tabel 2 di atas, nilai VIF untuk variabel PAD dan DAU bernilai lebih dari 1, dengan nilai tolerance Kurang dari 1. Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa data tidak terjadi multikolinieritas.

Setelah melakukan uji asumsi klasik, dilakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat 4 hipotesis. Berikut ini disajikan hasil uji hipotesis pada tabel 3 dan tabel 4 di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji t (Uji secara parsial)

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 (Constant) | 535915 | 911316 | ,321 | ,588 | ,588 |
| PAD | 23771,495 | 12996,641 | ,651 | 6,156 | ,000 |
| DAU | 1,636 | ,266 | | 12,50 | ,000 |
| | 1,421 | ,114 | | 4 | |

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dirumuskan persamaan regresinya sebagai berikut: $BM = 53591523771,495 + 1,636 PAD + 1,421 DAU + e$

Pengujian hipotesis pada tabel 3 dilakukan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh masing – masing variabel independen yaitu PAD dan DAU secara parsial terhadap variabel independen yaitu Belanja Daerah.

Hipotesis 1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah mendapatkan nilai signifikan $0.000 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa H1 diterima, yaitu PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Hipotesis 2

Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah mendapatkan nilai signifikan $0.000 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa H2 diterima, yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Tabel 4. Hasil Uji F (Uji secara simultan)

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig |
|------------|----------------|-----|-------------|---------|-------------------|
| 1 | 274578646 | 2 | 1372893 | 199,955 | ,000 ^b |
| Regression | 881307420 | | 2344065 | | |
| | 00000000,0 | 129 | 3710000 | | |
| | 00 | | 00000,00 | | |
| Residual | 885715157 | 131 | 0 | | |
| | 768194900 | | 6866008 | | |
| Total | 0000000,00 | | 9749472 | | |
| | 0 | | 4700000 | | |
| | 363150162 | | 00,000 | | |
| | 658126900 | | | | |
| | 00000000,0 | | | | |
| | 00 | | | | |

Hipotesis 3

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah mendapatkan nilai signifikan $0.000 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa H3 diterima, yaitu PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Hipotesis 4

Untuk mengetahui terjadi fenomena *flypaper effect* pada pengelolaan keuangan daerah, maka dibandingkan koefisien regresi variabel bebasnya. Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa nilai koefisien PAD terhadap Belanja daerah sebesar 1,636, sedangkan nilai koefisien DAU terhadap Belanja Daerah sebesar 1,421. Koefisien DAU $<$ Koefisien PAD ($1,421 < 1,636$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi fenomena *flypaper effect* pada pengelolaan keuangan daerah kota dan Kabupaten di Jawa Timur tahun 2013-2017.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

| | Hipotesis | Hasil Uji |
|----------------|--|-----------|
| H ₁ | Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2013-2017 | Diterima |
| H ₂ | Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2013-2017 | Diterima |
| H ₃ | Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2013-2017 | Diterima |
| H ₄ | Terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota dan | Ditolak |

Kabupaten di Jawa

Timur Tahun 2013-2017

Sumber: data diolah, 2019

PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Terdapat pengaruh signifikan PAD terhadap belanja daerah, dan pengaruhnya positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD maka alokasi untuk belanja daerah juga semakin tinggi. Dengan meningkatnya PAD maka pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan pelayanannya kepada masyarakat. Belanja daerah dapat dialokasikan ke belanja langsung seperti belanja modal, maupun belanja tidak langsung misalnya belanja operasional. Diharapkan tiap – tiap daerah dapat meningkatkan penerimaan pendapatannya yang bersumber dari PAD, dan menggali potensi – potensi penerimaan daerahnya secara maksimal sehingga pendapatan daerah yang berasal dari PAD meningkat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Ihsan dan Supriyati (2016), Pramuka (2010) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Terdapat pengaruh signifikan DAU terhadap belanja daerah, dan pengaruhnya positif. DAU mempunyai keterikatan dengan belanja daerah. DAU yang diberikan pemerintah pusat pada daerah diperuntukkan agar pemerataan keaungan antar daerah terjadi. Hal ini tidak akan menimbulkan kesenjangan antar daerah karena sumber PADnya berbeda – beda. DAU dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk menambah pengeluaran pemerintah dalam belanja daerah, yang dapat dituangkan dalam belanja langsung maupun belanja tidak langsung. DAU merupakan transfer dana yang bersifat “*block grant*”, sehingga pemerintah daerah leluasa untuk

menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari daerah (Halim, 2017). Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih mempunyai ketergantungan dengan pemerintah pusat dengan diberikannya dana perimbangan, yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan daerahnya apalagi adanya keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk membelanjakan dana tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wahyuni dan Supheni (2017), Ihsan dan Supriyati (2016), Pramuka (2010) memperoleh hasil bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini membuktikan bahwa pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan kegiatannya tidak hanya menggantungkan pada PAD saja tetapi juga dana perimbangan dari pemerintah pusat, khususnya DAU. Semakin besar PAD dan adanya dana perimbangan yaitu DAU menambah pendapatan daerah, sehingga pengeluaran daerah berupa belanja daerah juga dapat bertambah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wahyuni dan Supheni (2017), Ihsan dan Supriyati (2016), Pramuka (2010) memperoleh hasil bahwa PAD dan DAU berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah.

Tidak terjadi Flypaper Effect pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Nilai koefisien PAD terhadap belanja daerah lebih besar dari pada nilai koefisien DAU

terhadap belanja daerah. Artinya tidak terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Kota dan Kabupaten di Jawa Timur tahun 2013-2017. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah ingin mewujudkan otonomi daerah yang kuat, dengan tingkat kemandirian daerah yang tinggi. Dengan implementasi bahwa belanja daerah yang dilakukan bersumber utama dari PAD. Pemerintah daerah menganggap bahwa DAU sebagai bantuan dari pemerintah pusat untuk menunjang peningkatan PAD, dan mengalokasikan belanja daerahnya pada PAD. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam memberikan DAU. Pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang baik, dengan berusaha mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat dengan pemberian dana transfer dari pusat. Pemerintah daerah menganggap bahwa DAU yang diberikan merupakan stimulus untuk meningkatkan kemandirian daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pramuka (2010), yang melakukan penelitian di kota dan kabupaten di Jawa, bahwa tidak ada ketergantungan pemerintah daerah dalam belanjanya kepada DAU.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh antara PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Adapun hal tersebut terjadi, tidak ditemukan fenomena *Flypaper Effect* terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah kota dan Kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2013-2017 masih mampu mengendalikan diri untuk tidak bergantung pada DAU untuk pengeluaran belanja daerahnya. Perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pendapatan dari sumber asli daerah, dan menggali potensi daerah yang belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Armawaddin, M., W.A. Rumbia, dan M. N. Afiat. 2017. Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(1): 77-91.
- Halim, A. 2017. *Manajemen Keuangan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ihsan, W.R. dan Supriyati. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur 2011-2013. Online: http://eprints.perbanas.ac.id/1773/1/ARTI_KEL%20ILMIAH.pdf Diunduh pada 1 Maret 2019.
- Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect Pada Dana alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, 23-26 Agustus 2006, Padang.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manejemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Pramuka, B.A. 2010. Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1): 1-12.
- Urip, T. P dan R. Indahyani. 2017. Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 1(2): 9-21.
- Wahyuni, S.E. dan I. Supheni. 2017. Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. *Akuntansi Dewantara*, 1(2): 188-200.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan.

www.djpk.kemenkeu.go.id